

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DISEKTOR KESEHATAN,
PENDIDIKAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATRA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI HAMDANI RASYID
19060108**

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

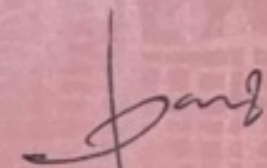
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN,
PENDIDIKAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN KAB/KOTA DI SUMATERA BARAT

Nama : Muhammad Rizki Hamdani Rasyid
BP / NIM : 2019 / 19060108
Keahlian : Ekonomi Publik
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 03 Juni 2024

Mengetahui,

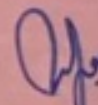
Kepala Dapertemen Ilmu Ekonomi,



Dr. Novya Zulva Riani, S.E., M.Si.
NIP. 197111042005012001

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Pembimbing,



Mike Triani, S.E., M.M.
NIP. 197111042005012001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

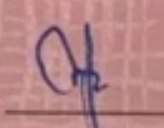
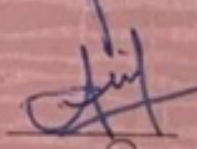
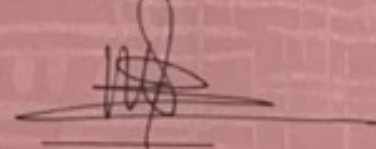
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR KESEHATAN,
PENDIDIKAN DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN KAB/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Nama : Muhammad Rizki Hamdani Rasyid
NIM/TM : 19060108/2019
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 03 Juni 2024

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Mike Triani, S.E,M.M	1. 
2.	Anggota	: Ariusni, S.E,M.S.i	2. 
3.	Anggota	: Dr.Muhammad Irfan, S.E,M.S.i	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Rizki Hamdani Rasyid
NIM/TM : 19060108/2019
Tempat/Tanggal Lahir: Padang Sibusuk/ 28 Desember 1999
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Amal Ujung No.25 Sebanga(Kampung Terendam), Duri-Riau
No. HP/Telepon : 082174063534
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Rizki Hamdani Rasyid

NIM. 19060108

ABSTRAK

Muhammad Rizki Hamdani (19060108) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibu Mike Triani.S.E,M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan Teknis Analisis Regresi Panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *Cross Section* (tahun 2018-2022 : 5 tahun) dengan data *Cross Section 19* kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan berhubungan dan bernilai negatif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dan Variabel Partisipasi Angkatan Kerja bernilai Negative dan Signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : *Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kemiskinan, dan Data Panel*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya kepada umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan Skripsi ini atas izin Allah SWT ssebagai pemegang kendali. Penulis juga sadar bahwa dalam Proses Penuisan Skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kendala dan rintangan dapat diatasi, semua ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan segenap keluarga besar yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang maksimal.

Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Teruntuk dua orang yang spesial di hidup penulis ibu Silfanis dan Ayah Jonifer. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, do'a, motivasi semangat dan nasihatnya. Semoga Allah SWT selalu menjaga Ibu dan Ayah dalam suka dan duka,amin. Teruntuk ibu sehat sehat selalu sampai riski sukses supaya keinginan kita berdua untuk pergi umroh terwujudkan. Dan teruntuk

alm.ayahnda Jonifer semoga Allah menepatkan ayah di tempat yang terindahh, dan riski akan menjaga ibu dan membahagiakan ibu selayaknya ayah menyangi ibuu dulunya.

2. Teruntuk Saudara Kandung Keluarga Jonifer FAMS, Kakak pertama Luthfi Alfadhlullah terimakasih sudah selalu mensupport dan motivasi baik dalam materi dan perkataan seperti yang sering di sebut “yang merubah Hidup kita itu diri sendiri bukan orang lain”. Dan teruntuk Kakak Kedua Mujahid Alfadhlullah terimakasih sudah selalu mensupport dan mengasi masukan seperti yang sering di sebut “Rodho Allah terletak Pada ibu, jadi Tolong jaga Komunikasi dan Hubungan Sama Ibu”. Dan teruntuk adek bungsu Muhammad Azzam Al Habib terimakasih sudah selalu mengasih semangat agar Penulis cepat menyelesaikan Tugas Akhir dan kuliahnya.
3. Teruntuk Keluarga Besar Rangkayo Batuah dan Keluarga Besar Sutan Rajo Enda Terima kasih telah membantu penulis dengan support dan masukan baik dalam segi materi, fasilitas dan motivasi.
4. Ibu Mike Triani, S.E, M.M selaku pembimbing Skripsi, yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Prengki Susanto, S.E, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Dr. Novya Zulva, S.E, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

7. Ibu Ariusni,S.E,M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Muhammad Irfan S.E,M.S.i selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri pada yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan serta penulisan Skripsi ini.
10. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu Penulis dalam hal Pengurusan Administrasi.
11. Kepada Teman teman Group Mapendos, Terima kasih juga sudah menjadi Penyemangat dan motivasi penulis dalam membuat Skripsi. Penulis sangat berharap kita bisa selalu sukses bersama dan Silaturahmi kita Terjaga walaupun kita Sudah berjauhan nantinya.
12. Kepada teman Ilmu Ekonomi Angkatan 2019, Khususnya kepada Ica terimakasih selalu berbagi informasi dan selalu sabar mengajarkan penulis dalam penulisan dan pengolahan Data dalam membuat Skripsi ini.
13. Kepada Andini Adisti , Terima kasih sudah selalu menemani Penulis dan selalu mensupport penulis di saat penulis dalam suka duka. Dan terima kasih juga sudah selalu sabar menghadapi penulis dan selalu disusahin oleh penulis. Penulis yakin apa yang ditakdirkan milik kita bagaimanapun jalannya akan menjadi milik kita.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca terhadap Skripsi ini agar dapat menjadi Karya yang bernilai dan bermanfaat.

Padang, 19 Februari 2024

Muhammad Rizki Hamdani Rasyid

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori dan Defenisi Kemiskinan	13
2. Penyebab Kemiskinan.....	17
3. Pengeluaran Pemerintah.....	22
4. Partisipasi Angkatan Kerja	25
B. Hubungan Antar Variabel.....	29
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kemiskinan.....	29
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kemiskinan.....	30
3. Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan.....	32
C. Penelitian Terdahulu	33
D. Kerangka Konseptual.....	36
E. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	39

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
2. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian.....	53
3. Analisis Data	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2018-2022 (Persen).....	54
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Miliar)	56
Tabel 4.3 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022 (Miliar)	58
Tabel 4.4 Penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang Termasuk Angkatan Kerja yang Bekerja Di kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2018-2022	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedisitas.....	65
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Model Fixed Effect.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat (Persen) tahun 2018-2022	3
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat (Miliar) tahun 2018-2022	4
Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan di provinsi Sumatera Barat (Miliar) tahun 2018-2022.....	6
Gambar 1.4 Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat	9
Gambar 2.1 Skema Perangkap Kemiskinan (Chambers 1994).....	15
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

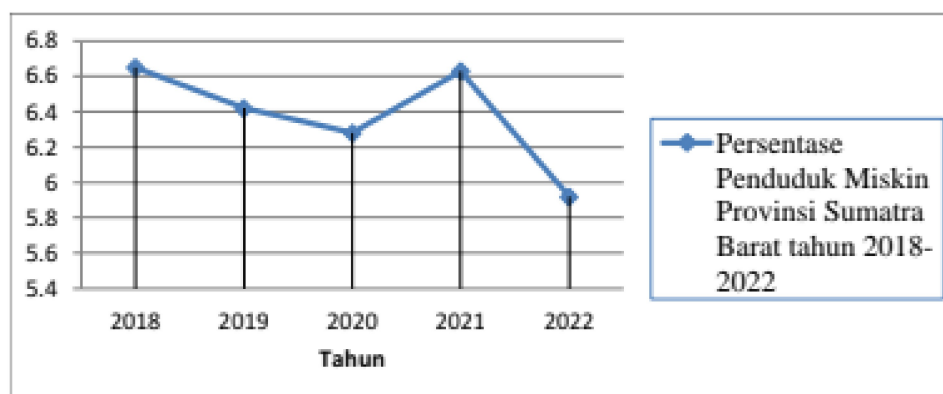
Dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas dituliskan bahwa tujuan dari pemerintah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Makna kesejahteraan yang dituliskan disini tentu sangat lah luas, bukan saja terkait dengan peningkatan pendapatan tetapi juga pemerataan distribusi pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa sedikit bergeser dari kata "kemiskinan".

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sampai saat ini masih dihadapi di Indonesia. Masalah kemiskinan ini adalah masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan. (Putri et al., 2019)

Menurut Bank Dunia (2021), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. pertama, dari pandangan konvensional kemiskinan di pandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Pandangan mengenai kemiskinan berikut adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan

memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, atau ketidaknyamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat. Artinya, kemiskinan adalah fenomena multimensi, dan solusi untuk mengatasinya tidak sederhana.

Kemiskinan memerlukan pemahaman yang mendalam dan langkah-langkah strategisnya untuk menghadapinya. Provinsi Sumatra Barat, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tetap saja menghadapi tantangan serius dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan jutaan penduduk. Tingkat kemiskinan di Sumatra Barat masih cukup tinggi, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat menjadi isu krusial dalam upaya pembangunan di daerah ini. Provinsi Sumatra Barat sebagai bagian integral dari Indonesia, tidak luput dari tantangan ini. Meskipun memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang beragam, tingkat kemiskinan yang masih signifikan di provinsi ini menjadi perhatian serius dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dan mengurangi tingkat kemiskinan. (BPS Sumatra Barat, 2022).



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat (Persen) tahun 2018-2022

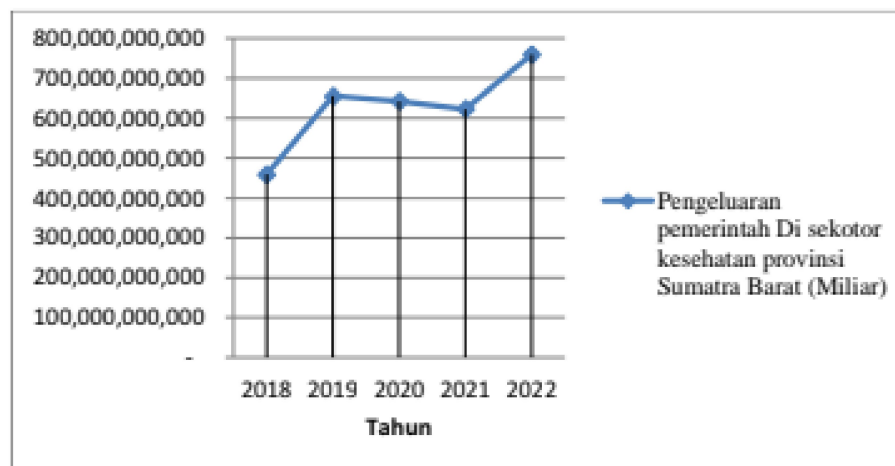
Sumber : (BPS Sumatera Barat, 2023)

Pada gambar 1.1 terlihat jelas bahwa dari tahun 2018-2022 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidak stabilan ekonomi, kesetaraan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan, kebijakan pemerintah dll. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2018 mencapai 6,65%. Sempat menurun pada tahun 2019 mencapai 6,42%, begitu juga pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 6,28%. akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 6,63%. dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 5,92%.

Di sisi lain biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan terhadap kemiskinan baik secara nasional maupun provinsi terus meningkat setiap tahun. Namun secara pasti apakah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan belum diketahui. Karena peran pemerintah terhadap kemiskinan mempunyai efek yang sangat besar. Salah satu acuan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola perekonomian adalah biaya

yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dilihat pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Struktur APBN yang digunakan saat ini yaitu anggaran berbasis kinerja sesuai dengan UU No.1 tahun 2004. Semenjak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamik untuk penyusunan APBN.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan merupakan bagian yang dibutuhkan pada indeks kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.



Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah di sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat (Miliar) tahun 2018-2022

Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumatera Barat

Pada gambar 1.2 terlihat jelas bahwa dari tahun 2018-2022 pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan di provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yaitu Faktor Ekonomi, kondisi kesehatan masyarakat, teknologi medis,

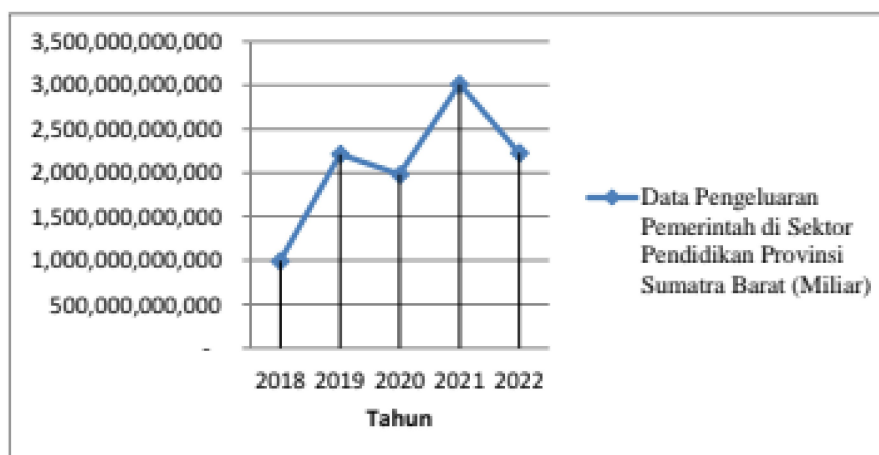
kebijakan asuransi kesehatan. Dari gambar diatas pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan di provinsi Sumatera Barat tertinggi yaitu pada tahun 2022 mencapai 759,5 Miliar. Pengeluaran pemerintah disektor kesehatan pada tahun 2018 mencapai 459 Miliar. Dimana pada tahun ini pengeluaran pemerintah disektor kesehatan terendah dari tahun 2018-2022. Tetapi pada tahun 2019 pengeluaran pemerintah disektor kesehatan mengalami peningkatan mencapai 655,4 Miliar. hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam segi kesehatan masyarakat dan teknologi medis. Dan pada tahun 2020 dan 2021 penngeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengalami penurunan kembali hingga mencapai 642,6 Miliar dan 623,3 Miliar.

Menurut kuznets dalam Jhingan (2012:337) pembentukan modal domestik tidak hanya mencakup biaya untuk konsumsi, peralatan dan persediaan dalam negeri, tetapi juga pada pengeluara lain. Jadi istilah pembentukan modal lebih luas lagi yaitu meliputi modal material dan modal manusia. Pembentukan modal manusia ini dilakukan misalnya dilakukan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai pendidikan daltihan untuk pekerja sehingga meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja, dengan meningkatnya kualitas kerja maka produktivitas mereka juga akan meningkat pula.

Salah satu permasalahan terkini pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan ialah ketidaksetaraan akses dimana dalam akses layanan kesehatan sering terjadi dimana beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki

akses yang lebih baik dari pada yang lain, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat miskin. Negara sulit memiliki sistem kesehatan terbaik karena adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur kesehatan, dan keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan (Lakshminarayana 2011). Pemerintah perlu meningkatkan tingkat belanja sektor kesehatan sehingga banyak masalah kesehatan bisa di atasi.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan ketrampilan. Pendidikan juga menampakan kesadaran akan pentingnya martabat manusia, mendidik dan memberi pengetahuan berarti menggapai masa depan, dan seharusnya pemerintah berda di garda terdepan untuk mewujudkannya. Pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Lemahnya produktivitas kelompok miskin disebabkan karena kurangnya akses mendapatkan pendidikan. (Hidayat & Azhar, 2022)



Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan di provinsi Sumatera Barat (Miliar) tahun 2018-2022

Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumatera Barat

Pada gambar 1.3 terlihat jelas bahwa dari tahun 2018-2022 pengeluaran pemerintah disektor pendidikan di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yaitu kondisi ekonomi, sumber dana, pemilihan pemimpin, infrastruktur sekolah dan kebutuhan siswa. Dari gambar diatas pengeluaran pemerintah disektor pendidikan di Sumatera Barat tertinggi pada tahun 2021 mencapai 3.014 Miliar. Pada tahun 2018 yaitu tahun dimana mengalami penurunan yang paling terendah mencapai 992,8 Miliar. pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 2.212 Miliar. tetapi pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami penurunan kembali mencapai 1.981 Miliar. pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali mencapai 2.227 Miliar.

Permasalahan yang terjadi di pengeluaran pemerintah disektor pendidikan ialah akses pendidikan dimana salah satu isu yang sering muncul adalah ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Dimana ketika pemerintah mengurangi atau tidak memadai pengeluaran untuk pendidikan, maka mungkin ada penurunan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok yang kurang mampu. Ini bisa menyebabkan lebih banyak anak miskin tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang dapat memperburuk kemiskinan. Selain akses pendidikan isu yang terjadi pada pengeluaran pemerintah disektor pendidikan yaitu kualitas pendidikan, dimana pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang rendah juga dapat mempengaruhi

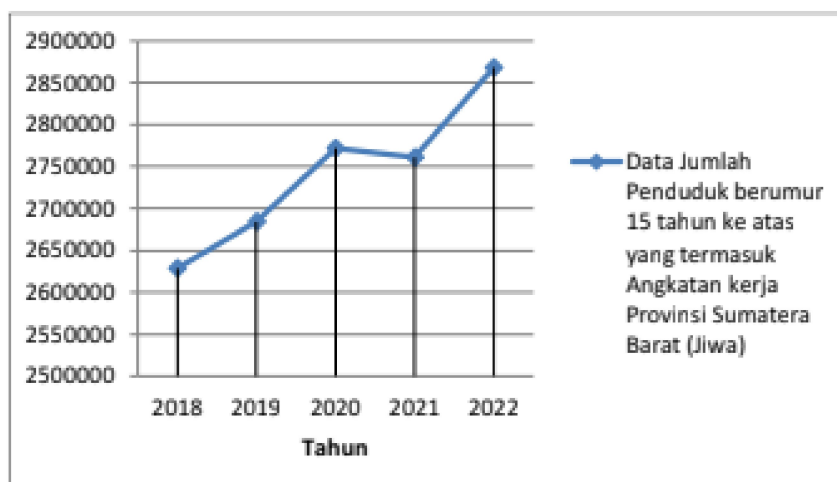
kualitas pendidikan. Kurangnya sumber daya dan fasilitas, serta gaji guru yang rendah, dapat mengurangi kualitas pendidikan. Ini bisa menghasilkan lulusan yang kurang berkualitas dan kurang siap untuk bekerja, yang kemudian dapat berdampak pada tingkat kemiskinan.

Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia ialah partisipasi angkatan kerja. Pada saat Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1998, terjadi perubahan dalam pembangunan lapangan kerja serta tumbuhnya pilihan pekerjaan. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di antara mereka yang dipekerjakan dari bermacam-macam lapangan kerja menjadi buktinya.

Ketika angkatan kerja menurun maka akan meningkatkan angka kemiskinan yang ada karena banyaknya masyarakat yang tidak bekerja menyebabkan pendapatan dalam rumah tangga berkurang dan pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluaran yang harus dikeluarkan. Sampai saat ini pemerintah masih mengupayakan dalam meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja, karena TPAK menjadi salah satu masalah sumber dari sumber kemiskinan. Jika di suatu wilayah memiliki masyarakat dengan angkatan tidak bekerja lebih banyak maka dapat meningkatkan jumlah masyarakat miskin, serta sebaliknya, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) menjadi sebuah ukuran yang digunakan untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi (Mala et al., 2017).

Angkatan kerja serta bukan angkatan kerja ialah divisi dasar dari angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ialah rasio

penduduk usia kerja terhadap angkatan kerja. Karena TPAK juga ikut membantu atau berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas warga sekitar. Intinya, TPAK bertujuan untuk mendapatkan upah untuk menghadapi dirinua serta keluarganya. Mengingat salah satu penyebab kemiskinan ialah angkatan kerja yang sedikit, pemerintah tetap berupaya menaikkan angka TPAK. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi di suatu daerah akan memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, begitu sebaliknya. (Mala et al., 2017).



Gambar 1.4 Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Badan Statistik Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat)

Pada gambar 1.4 terlihat jelas bahwa dari tahun 2018-2022 jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja mengalami fluktuasi. Penyebab terjadinya fluktuasi dikarenakan beberapa faktor yaitu pendidikan dan keterampilan, perubahan struktural, migrasi, kebijakan pemerintah, dll. Partisipasi angkatan kerja di atas 15 tahun yang termasuk angkatan kerja di provinsi Sumatera Barat yang tertinggi pada tahun 2022

mencapai 2,8 juta jiwa. Pada tahun 2018 partisipasi angkatan kerja yang diatas 15 tahun yang termasuk angkatan kerja mencapai 2,62 juta jiwa. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan mencapai 2,68 juta jiwa dan 2,77 juta jiwa. Tapi pada tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 2,76 juta jiwa.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan tingkat kemiskinan di Sumatra Barat adalah berkaitan dengan naik turunnya Angkatan Kerja dan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan kesehatan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Apakah bisa memberikan efek yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Seberapa besar pengaruh partisipasi Angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatra Barat pada tahun 2018-2022?
2. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kemiskinan di sumatra barat pada tahun 2018-2022?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Sumatra Barat pada tahun 2018-2022?
4. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di sumatra barat pada tahun 2018-2022.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi angkatan kerja kemiskinan di sumatera barat pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap kemiskinan di Sumatera barat pada tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2018-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna berbagai bahan Pustaka untuk penelitian selanjutnya dan berguna untuk mengembangkan ilmu ekonomi
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mendalam mengenai Angkatan kerja, pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.
3. Digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Angkatan kerja, pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan untuk mencapai Sumatera Barat yang lebih baik.
4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk eksplorasi tambahan bagi peneliti berikutnya dengan topik penelitian tentang kebutuhan.